

Judul : 1,2 Juta Calon ASN Bisa Segera Diangkat
Tanggal : Minggu, 09 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

1,2 Juta Calon ASN Bisa Segera Diangkat

Komisi II DPR memastikan tidak ada kesepakatan bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Bagi peserta seleksi, penundaan pengangkatan ini merugikan mereka.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunda pengangkatan sekitar 1,2 juta calon aparatur sipil negara atau CASN, yakni pada Oktober 2025 untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan Maret 2026 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. DPR menegaskan, justru pihaknya menginginkan pengangkatan CASN dapat dipercepat.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aria Bima saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (8/3/2025), menegaskan, dari rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) pada Rabu (5/3), tidak ada keputusan Komisi II DPR serta Kemenpan dan RB bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

"Tidak ada sama sekali kesepakatan bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Jadi, tidak ada kesepakatan penundaan, justru DPR meminta prosesnya dipercepat," ucap Aria Bima.

Salah satu poin kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB pada 5 Maret pun menyebutkan, dalam rangka percepatan penataan CPNS dan PPPK untuk formasi 2024, Komisi II DPR meminta Kemenpan dan RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan

pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

Bima mengatakan, Komisi II DPR memberikan batas akhir penataan CPNS dan PPPK itu bukan berarti pengangkatan CPNS dan PPPK di seluruh instansi harus dilakukan serentak sesuai batas akhir waktu yang diberikan. Instansi yang dapat menyelesaikan penataan lebih cepat bahkan diminta untuk segera mungkin mengangkat CPNS dan PPPK.

Diragukan

Polemik pengangkatan serentak ini menimbulkan keresahan di kalangan CASN. Adapun dari 1,2 juta CASN, menurut uraian data per Januari 2025 Kemenpan dan RB, terdapat 248.970 CPNS dan 1.017.111 PPPK.

Dari beberapa jadwal seleksi CPNS tahun anggaran 2024 disebutkan, penetapan nomor induk pegawai (NIP) CPNS 2024 dijadwalkan selesai Maret 2025. Penetapan NIP ini pada umumnya diikuti penyiapan surat keputusan pengangkatan CPNS.

Petisi penolakan penundaan pengangkatan CASN pun muncul di kanal Change.org berjudul "Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 2024". Dalam waktu kurang dari 24 jam, petisi itu sudah ditandatangani 39.504 dari target 50.000 tanda tangan.

Seorang guru PPPK di salah satu daerah di Jawa Timur, Rina (26, bukan nama sebenarnya), menyatakan sempat beranggapan dirinya akan diangkat pada Maret ini, sesuai jadwal seleksi CPNS dan PPPK. Dengan demikian, gajinya bisa meningkat. Namun,

dengan adanya penundaan pengangkatan membuat rencananya membantu mencicil pelunasan utang ibunya menjadi buyar.

Selain kecewa, dia juga meragukan pengangkatan PPPK pada Maret 2026 akan ditepati. "Penundaan yang sekarang ini saja tiba-tiba. Takutnya tahun depan juga tiba-tiba berubah," ujarnya.

Rina masih menunggu perubahan yang lebih memihak kepada guru-guru PPPK dan CPNS, yang juga pengangkatannya ditunda. Rina mendengar kabar, para guru PPPK dan CPNS yang terdampak kebijakan penundaan itu akan berunjuk rasa. Dia berharap pemerintah serius memperhatikan dampak dari penundaan ini. Jangan sampai berdampak buruk.

Dihubungi secara terpisah, Menpan dan RB Rini Widyaningrum memastikan bahwa CPNS dan PPPK yang lulus akan diangkat sesuai dengan terhitung mulai tanggal (TMT) yang telah disepakati bersama DPR. Untuk itu, Kemenpan dan RB serta BKN memastikan pengangkatan serentak CPNS pada TMT 1 Oktober 2025 dan PPPK pada TMT 1 Maret 2026.

"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Rini, BKN sedang menyiapkan peta jalan (*road map*) pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan semua peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk bagi peserta yang saat ini masih

(Bersambung ke him 15 kol 5-7)

1,2 Juta Calon ASN Bisa Segera Diangkat

(Sambungan dari halaman 1)

mengikuti seleksi.

Bukan hal wajar

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan mengatakan, penundaan pengangkatan CASN sampai 6-7 bulan bukanlah hal yang wajar. Selama ini pengangkatan ASN selalu berjalan tepat waktu. "Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo tidak pernah ada penundaan," katanya.

Adanya ketidakpastian untuk pengangkatan kali ini, menurut Djohermansyah, bisa memengaruhi kehidupan para CASN. Sebab, banyak dari mereka yang sebelumnya telah bekerja dan memutuskan mundur dari tempat kerjanya demi fo-

kus pada penugasan sebagai ASN.

Ketidakpastian ini juga berdampak bagi institusi pemerintahan, terutama di sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pasalnya, ASN baru biasanya direkrut untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pegawai yang pensiun. Dengan adanya penundaan ini, berbagai instansi menghadapi kekurangan tenaga kerja yang berimbas pada terganggunya pelayanan publik.

Akan dipanggil lagi

Agar ada kepastian bagi para CASN, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong memastikan, pihaknya berkomitmen memperjuangkan nasib CPNS dan PPPK yang telah lolos seleksi. Semua CPNS dan PPPK yang

lolos seleksi pengadaan 2024 pasti diangkat tanpa terkecuali.

Aria Bima juga memastikan bahwa Komisi II DPR akan kembali memanggil Menpan dan RB Rini Widyantini untuk meluruskan interpretasi yang keliru dalam waktu dekat. Dia memastikan pemanggilan dilakukan sebelum masa reses DPR pada 21 Maret.

Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk merevisi keputusan itu agar kebijakan pengangkatan CPNS dan PPPK lebih jelas sehingga sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kalau pada prosesnya Kemenpan dan RB menafsirkan pengangkatannya harus serentak, tidak menutup kemungkinan akan membahas kembali dan mengevaluasi kebijakan tersebut," ucapnya.

(SYA/MHF/DNA)